

Eksternalitas dan Kebijakan Publik pada Komplek Lokalisasi PSK Pulau Baai di Kota Bengkulu

Externality and Public Policy on Prostitution Localization Complex in Pulau Baai Kota Bengkulu

¹Citra Puspita Putri, ²Asnita Frida S, ³Dewi Rahmi

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email : ¹Cferrly@gmail.com, ²Atikah_Frida@yahoo.com, ³Derahmi@gmail.com

Abstract. the existence of places of localization on the island occurred frequently resulted in actions Baai criminality i.e. the localization visitors fight between drunken with the residents, there are also some people assume the existence of a localization become a lethal disease and nests can be transmitted i.e. HIV/AIDS. The spread of this disease happens very quickly and generally strikes people who are at the age of productive, so that in itself disrupts the availability of potential human resources for the development of a country. In this research that became the sample as much as 90 respondents Baai Island community. The purpose of this research is to identify the Forms – form of externalities arising in the activity of prostitution in the complex localization Baai Island in the city of Bengkulu, to identify the forms – forms a suitable public policies to deal with the problem of localization in the PSK Baai Island. Based on the results of data analysis using descriptive and Quantitative study results showed much of the impact felt by the community about the existence of localization in the presence of positive externalities Baai Island and negative externalities. Public policy conducted by the Government of the city of Bengkulu will plan to close places of localization.

Keywords: eksternalitas, Public Policy, localization.

Abstrak. Adanya tempat lokalisasi di Pulau Baai mengakibatkan seringnya terjadi tindakan kriminalitas yaitu perkelahian antara pengunjung lokalisasi yang mabuk dengan warga, ada juga sebagian masyarakat menganggap adanya lokalisasi menjadi sarang penyakit yang mematikan dan bisa menular yaitu HIV/AIDS. Penyebaran penyakit ini terjadi dengan sangat cepat dan umumnya menyerang orang yang berada pada usia produktif, sehingga dengan sendirinya mengganggu tersedianya potensi sumber daya manusia bagi perkembangan suatu negara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk – bentuk eksternalitas yang ditimbulkan dalam kegiatan prostitusi di komplek lokalisasi Pulau Baai di Kota Bengkulu dan mengidentifikasi bentuk – bentuk kebijakan publik yang cocok untuk menangani masalah PSK di komplek lokalisasi Pulau Baai. Dalam penelitian ini yang menjadi sample sebanyak 90 responden masyarakat Pulau Baai. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Deskriptif dan Kuantitatif Hasil penelitian menunjukkan banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya lokalisasi di Pulau Baai adanya eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu akan merencanakan untuk menutup tempat lokalisasi tersebut.

Kata Kunci: Eksternalitas, Kebijakan Publik, lokalisasi.

A. Pendahuluan

Penutupan tempat lokalisasi terlihat tidak efektif dalam rangka membasmi praktik prostitusi karena banyak sebab yang melatar belakanginya, di antaranya persoalan dasar yang dihadapi PSK tidak terselesaikan dengan ditutupnya tempat lokalisasi, justru dengan penutupan tempat lokalisasi membuat keberadaan PSK bisa terdistribusi rata di tempat-tempat strategis. Mereka bisa berpraktik secara terbuka, atau dengan kedok berbagai usaha. Hingga sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil secara tuntas mengeliminasi semua masalah yang berkaitan dengan prostitusi. Faktor yang paling menentukan keterlibatan seseorang dalam praktek prostitusi adalah tekanan ekonomi. Dalam era pembangunan yang melaju pesat menuju negara industri, persaingan untuk memperoleh penghidupan yang baik sangat banyak ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Daya saing seseorang dengan pendidikan tinggi

tentunya lebih kuat dari pada mereka yang berpendidikan rendah, disamping lahan pekerjaan yang semakin terbatas.

Pemerintah jika hanya sebatas melarang kegiatan prostitusi dengan undang-undang dan regulasi lainnya, dengan alasan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kebijakan tersebut, maka hal itu justru akan mendorong terjadinya prostitusi berlangsung secara “bawah tanah”. Pada tahap berikutnya, prostitusi bawah tanah akan mendorong munculnya campur tangan organisasi kriminal terorganisasi (premanisme), korupsi di kalangan penegak hukum dan muncul masalah sosial lainnya. Praktek pelacuran yang belangsung di Indonesia, umumnya tersebar diberbagai lokasi, sehingga sulit dilakukan pendataan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan. Selain itu keberadaan pelacuran di masyarakat dinilai telah mengganggu perkembangan khususnya bagi generasi muda. Pelacuran memang sulit dihapus kecuali mengurangi, menekan dan membatasi pertumbuhan dan penyebarannya. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan upaya melokalisir perkembangan dan pertumbuhan praktek pelacuran, dengan membentuk proyek lokalisasi/rehabilitasi sosial WTS, termasuk diantaranya Lokalisasi di Pulau Baai yang berada di Kota Bengkulu.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah di Indonesia, dimana struktur ekonomi ditopang oleh sektor jasa, kontribusi sektor jasa di provinsi Bengkulu pada tahun 2014 adalah sebesar 5.223.298,41 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, ternyata lapangan usaha jasa di Provinsi Bengkulu merupakan sektor penopang perekonomian yang cukup besar di Provinsi Bengkulu.

Pulau Baai yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Pemerintah daerah setempat memang menyebutnya sebagai kawasan "eks lokalisasi", tetapi dalam kenyataannya, tempat itu masih merupakan area pelacuran, dan bahkan tumbuh subur hingga kini. Lokalisasi kompleks PSK di Pulau Baai telah berdiri sejak tahun 1980an berawal dari tanah pegunungan dan semak belukar lalu di bukanya lahan untuk lokalisasi kompleks yang letaknya agak jauh dari Kota Bengkulu sehingga jarang untuk dilalui, sejauh lima kilo meter dari kantor desa. Awal mula berdiri belum ada pemukiman warga hanya kompleks PSK tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kompleks PSK yang berada di Pulau Baai berdirinya Komplek Pulau Baai ini atas rembukan, musyawarah dan keputusan dari tingkat Kota Bengkulu dan POLSEK Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa kompleks PSK akan di tempatkan di Pulau Baai juga memberi izin kepada para pemilik wisama atau geremo-geremo melakukan penjualan jasa PSK serta izin menjual minuman beralkohol serta izin HO atau yang lebih dikenal dengan izin gangguan atau keributan yang berupa musik keras. Lokalisasi yang ada di Pulau Baai memiliki jumlah PSK sebanyak 200 yang menghuni kompleks PSK dengan banyaknya warga pendatang diluar Kota Bengkulu, hal di rasa oleh sekretaris desa tahun 2015 ini meningkat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya dari sebagian masyarakat Pulau Baai khususnya sekitar lokalisasi di Kota Bengkulu. Dengan adanya kegiatan prostitusi di kompleks lokalisasi pulau Baai, tentunya akan menimbulkan dampak eksternalitas baik positif maupun negatif yang dirasakan oleh berbagai pihak diluar kegiatan tersebut. Namun saat ini, dampak yang timbul dari adanya kegiatan tersebut lebih mengarah kepada eksternalitas negatif, dimana para warga sekitar yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut dinilai negatif oleh warga lainnya, sehingga status sosial mereka dianggap kurang baik (Camat Kp. Melayu, 2016).

Adanya tempat lokalisasi di Pulau Baai mengakibatkan seringnya terjadi tindakan kriminalitas yaitu perkelahian antara pengunjung lokalisasi yang mabuk dengan warga, ada juga sebagian masyarakat menganggap adanya lokalisasi menjadi sarang penyakit yang mematikan dan bisa menular yaitu HIV/AIDS. Penyebaran penyakit ini terjadi dengan sangat cepat dan umumnya menyerang orang yang berada pada usia produktif, sehingga dengan sendirinya mengganggu tersedianya potensi sumber daya manusia bagi perkembangan suatu negara.

B. Landasan Teori

Kosep dan Definisi Kebijakan Publik

Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu : penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penulisan dan evaluasi. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Anderson dalam Widodo, 2001:190). Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood mengemukakan pengertian kebijakan publik yaitu A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals and the mean for achieving those goals (Seperangkat intruksi dari para pembuat kebijakan untuk pelaksana kebijakan yang menguraikan dua gol yang berarti untuk mencapai tujuan tersebut) (Nakamura, 1980:31).

Eksternalitas

Definisi lain mengenai eksternalitas menurut Mankiw (2000), eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau pihak yang mempengaruhi kesejahteraan atau kondisi/pihak lain. Dampak dari tindakan ini dapat merugikan dan dapat pula menguntungkan. Jika dampaknya tergolong merugikan maka eksternalitas itu disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, jika dampak yang muncul menguntungkan maka disebut eksternalitas positif.

Eksternalitas dilihat dari dampaknya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Eksternalitas positif
Eksternalitas positif yaitu dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan.
2. Eksternalitas negatif
Eksternalitas negatif yaitu dampak yang merugikan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang dirugikan.

PSK

PSK (Pekerja Seks Komersial) merupakan para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut (Koentjoro, 2004:26). Terjadi perubahan yang serba

cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kehidupan mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri sehingga timbul disharmoni, konflik-konflik internal maupun eksternal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi manusia.

Peristiwa-peristiwa tersebut memudahkan individu menggunakan pola reaksi yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini adalah pelacuran (PSK)

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, sementara untuk menganalisis persepsi maka digunakan skala likert. Jumlah populasi yang digunakan sebanyak 933 responden dengan sample sebanyak 90 responden dengan menggunakan rumus slovin.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari analisis data menunjukkan bahwa adanya dampak aspek hukum, dampak aspek kesejahteraan sosial, dampak aspek kesehatan, dampak terhadap sektor ekonomi dengan adanya lokalisasi di Pulau Baai. Eksternalitas yang timbul adanya lokalisasi yaitu positif dan negatif yang diinginkan oleh masyarakat di Pulau Baai. Adapun kebijakan publik yang direncanakan oleh pemerintah Kota Bengkulu untuk menutup lokalisasi di Pulau Baai.

Daftar Pustaka

- Amalia Sandra Astry, Dampak Lokalisasi PSK Pada Masyarakat Sekitar, Administrasi Negara FISIP, Universitas Mulawarman, 2013, Jurnal
- Mangkoesebroto Guritno, Juni. 1993. Ekonomi Publik. BPFE. Yogyakarta
Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu
- Purnomo, Tjahto dan Siregar, Ashadi. 1984. Dolly : Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly, cet III. Jakarta : Graffitipress.